BAB II

KERANGKA TEORITIK

A. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Desa Produktif

1. Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah konsep yang yang paling sering kita dengar, namun demikian kita sering kali tidak benar-benar memahami maknanya. Pemberdayaan adalah sebuah "proses menjadi", bukan sebuah "proses instan". Sebagai proses pemberdayaan mempunyai tiga tahapan: penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan.

Tahap pertama adalah penyadaran. Pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi "pencerahan" dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai sesuatu. Misalnya target adalah kelompok masyarakat miskin. Kepada mereka diberikan pemahaman bahwa mereka dapat menjadi berada, dan itu dapat dilakukan jika mereka mempunyai kapasitas untuk keluar dari kemiskinannya. Pemberdayaan tersebut dumulai dari diri mereka sendiri bukan tidak dari orang lain atau orang luar.

Setelah menyadari, tahap kedua adalah pengkapasitasan, inilah yang sering kita sebut "capacity building" atau dalam bahasa yang lebih sederhana memampukan atau enabling. Untuk diberikan daya atau kuasa, yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu. Proses capacity building terdiri atas tiga jenis yaitu manusia, organisasi dan sistem nilai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengkapisitasan manusia dalam arti memampukan manusia baik dalam konteks individu maupun kelompok manusia untuk mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan. Pengkapsitasan kedua adalah pengkapasitasan organisasi dilakukan dalam bentuk restrukturisasi organisasi yang hendak menerima daya atau kapasitas tersebut. Pengkapisatasan ketiga adalah sistem nilai. Setelah orang dan wadahnya dikapasitaskan, sistem nilainya pun demikian. Sistem nilai adalah aturan main. Pengkapasitasan sistem nilai dailakukan dengan mambantu target dan membuatkan aturan main diantara mereka sendiri.

Tahap ketiga adalah pemberian daya itu sendiri atau empowerment dalam makna sempit. Pada tahap ini kepada target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang. Pemberian ini sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki. Pada tahap ketiga ini cukup sederhana, namun kita sering kali tidak cakap menjalankannya karena mengabaikan bahwa dalam kesederhaan pun ada ukurannya. Pokok gagasannya adalah bahwa proses pemberian daya atau kekuasaan diberikan sesuai dengan kecapakan penerima.[12]

Secara konsep, pemberdayaan berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdaan). Oleh sebab itu pemberdayaan bersentuhan dengan

---

[12] Randy R Wrihatnolo, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat,* (Jakarta: PT Elex Koputindo,2007), hal. 3-6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka dalam hal tertentu.[13]

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat bersangkutan. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan dan dalam pengertian dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat menjadi sumber dari apa yang ada dalam wawasan politik pada tingkat nasional disebut ketahanan nasional.

Dalam pengertian lain, Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan aatu mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian,

---

[13] Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial,* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan kehidupannya.[14]

Menurut Soetarso bahwa pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya mempunyai dua pengertian yang saling berkaitan yaitu :

a. Peningkatan kemampuan, motivasi dan peran semua unsur masyarakat agar dapat menjadi sumber yang langgeng untuk mendukung semua bentuk usaha kesejahteraan sosial.
b. Pemanfaatan sumber masyarakat yang telah ditingkatkan kemampuan, motivasi dan perannya. Lebih lanjutnya Soetarso mengungkapkan bahwa peningkatan kemampuan, motivasi, dan peran masyarakat berkaitan dengan pemahaman lingkungan, pemberian informasi, dragmatisai masalah, penggalangan dukungan, pembangunan momentum, penyediaan lahan dan tempat pengabdian, pelatihan dan pengemabangan.

Pengembangan masyarakat dapat didefinisikan sebagai metode yang memungkinkan individu-individu dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya. Menurut Twelve Trees, pengembangan masyarakat adalah "*The processes of assisting ordinary people to improve their own communities by understanding collective actions*".

Secara khusus, pengembangan masyarakat berhubungan dengan upaya pemenuhan kebutuhan orang-orang yang tidak beruntung atau tertindas,

---

[14] Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Refika Aditama,2005). Hal. 59-60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun oleh diskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, gender, jenis kelamin, usia dan kecacatan.[15]

2. Tujuan Pemberdayaan

Menurut David C. Korten, pembangunan selayaknnya ditujukan untuk mencapai sebuah standar kehidupan ekonomi yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Hal ini merupakan sebuah tahapan yang esensial dan fundamental menuju tercapainya tujuan kesejahteraan manusia. Kebutuhan dasar tidak dilihat dalam batasan-batasan minimum manusia, yaitu kebutuhan akan makanan, tempat tinggal, pakaian dan kesehatan, tetapi juga sebagai kebutuhan akan rasa aman, rasa sayang, mendapatkan penghormatan dan kesempatan untuk bekerja secara fair, serta tentu saja aktualisasi spiritual.[16]

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidak berdayaan, baik karena kondisi *internal* (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi *eksternal* (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya, meliputi:

a. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.

---

[15]. Zubaedi *Wacana Pembangunan Alternatif.* Hal. 19

[16].Moh. Ali Aziz, dkk, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi,* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), Hal. 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing.

c. Kelompok lemah secara personal, yakni merka yang mengalami masalah pribadi dan atau keluarga.[17]

3. Indikator Keberdayaan Masyarakat

Menurut Kieffer pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kopentensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kopetensi partisipatif. Ada tiga dimensi yang mangajukan pemberdayaan yang merujuk pada :[18]

a. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.

b. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.

c. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang di,mulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah yang kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan yang mengubah struktur-struktur yang masih menekan.

---

[17] Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Hal. 60
[18] Ibid, hal.63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Parson et.al. menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antara pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan klien. Hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan, namun demikian, tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya stategi inipun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengaitkan klien dengan sumber atau sistem lain diluar dirinys. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan yaitu:

a. Aras mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (task centered approach).

b. Aras mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

c. Aras makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar(*large-system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan kepada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi Sistem Besar memandang klien sebagai oarng yang memiliki kopetensi untuk memahami situasi mereka sendiri, dan untuk memilikh serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

B. PEMBANGUNAN MASYARAKAT

1. Definisi Pembangunan Masyarakat

Pembangunan *(development)* adalah proses social yang direncanakan atau direkayasa. *Development* adalah sebuah kata yang intinya merupakan perubahan social yang direncanakan atau rekayasa social. Pembangunan ini sering terjadi besar-besar di Negara dunia ketiga setelah tahun 1970.

Kata pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Kata ini diartikan sebagai usaha untuk memajukan masyarakat dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warganya. Dalam konteks bahasa inggris, kata pembangunan selaras dengan kata "*development*" yang berasal dari kata kerja "*to develop*" yang artinya "menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan atau mengubah secara bertahap. Dengan demikian pembangunan diartikan sebagai proses memajukan atau memperbaiki suatu keadaan melalui berbagai tahap secara terencana dan berkesinambungan.

Menurut Weider pembangunan adalah suatu pertumbuhan kearah modernisasi atau "*nation building*" dan kemajuan sosio-ekonomi yang meliputi deverensiasi substansial dan koordinasi. Sedangkan menurut Rakhmat *development* adalah *the passing of traditional society into a modern one* (beralihnya masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern). Sedangkan Katzs pembangunan sebagai perubahan yang lebih luas dari masyarakat terhadap suatu keadaan kehidupan yang kurang bernilai kepada keadaan yang lebih bernilai.[19]

2. Tujuan Pembangunan

Ada empat tujuan pembangunan sesuai konfrensi tinggi PBB:[20]

a. Penangulangi kemiskinan dan kelaparan

Kemiskinan merupakan faktor penyebab yang paling utama, faktor lain yang dapat diperlementasikan. Seandainya pendidikan tidak miskin, dimana mereka lebih gesit dari daerah rawan bencana. Penduduk miskin di Indonesia pada tahun 1999

---

[19] Abu Huraerah. *Pengorganiasian & PengembanganMasyarakat.* (Bandung. Humaniora. 2008) hal.12

[20] Randy R Wrihatnolo, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT Elex Koputindo,2007), hal. 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencapai 48 juta jiwa, menurun menjadi 37,3 juta pada tahun 2003, dan akhir Februari 2004 berkurang menjadi 36,1 juta. Dengan inilah kemiskinan harus diminimalisir untuk mencapai pembangunan.

b. Mencapai pendidikan

Pendidikan merupakan prasyarat dalam pengembangna manusia untuk meluaskan pilihan dan perwujudan potensi manusia. Pendidikan juga menjadi sumber daya penting untuk mengurangi kerentanan manusia

c. Mendorong kesejahteraan gender dan pemberdayaan perempuan

Pada saat dan sesudah bencana perempuan memainkan peran utama dalam menyediakan bantuan kepada keluarga dan masyarakat. Mereka sering kali tak sebanding, dan secara negatif dipengaruhi oleh dampak bencana dan perempuan juga mendapatkan kekerasan dalam rumah tangganya dan exploitasi sebagai akibat bencana.

d. Menurun angka kematian

Ketiadaan dan penurunan kesehatan disebabkan karena terjangkitnya wabah penyakit dan kehilangan angka kematian pencarian nafkah, ini yang membuat manusia akan rentan terhadap pelayanan kesehatan yang tidak memadahi.

Tujuan akhir pembangunan ekonomi adalah menciptakan masyarakat sejahtera baik pada generasi saat ini maupun pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

generasi masa depan. Sesuai dengan paradigma pemberdayaan ekonomi maka telah terjadi perubahan tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi dari pendekatan pertumbuhan (*growth*), menjadi pendekatan kwalitas hidup (*kwality of live*). Landasan empirik menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu dpat memecahkan masalah kesejahteraan seperti kemiskinan dan taraf hidup masyarakat yang luas.

Selain itu dalam penerapan tujuan ekonomi saat ini belum tampak begitu jelas strategi yang digunakan menjadi antisipasi terjadinya penurunan kwalitas lingkungan yang disebabkan karena adanya externalitas di proses produksi. Dengan demikian pertunbuhan ekonomi yang sebenarnya bersifat semu. Sejak tahun 1960-an dengan pendekatan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan pembangunan ekonomi maka telah berimplikasi terhadap kebutuhan nasional tidak seimbang antara sektor pertanian vs non pertanian atau pengembangan kapital dalam sektor riil.

3. Pendekatan pembangunan

Pendekatan adalah suatu konsep yang bedimensi luas dan senantiasa berkembang dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan dilihat dari pendekatannya kian beragam, seperti yang dikatakan Neil, pembangunan memiliki multi dimensi dalam pendekatannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pendekatan Pertumbuhan Ekonomi (*Economic Growth Approach*)

Konsep pembangunan pada 1970-an bertumpu pada laju pertumbuhan GNP (*Gross National Product*) per kapita yang cepat.kenaikan GNP diharapkan akan "menetes kebawah" (*trickle down effect*) kepada masyarakat luas dalam bentuk pekerjaan dan kesempatan ekonomi lainnya. Dengan demikian masalah kemiskinan, pengangguaran, pemerataan hasil pemabangunan dapat teratasi dengan sendirinya. Ketika itu hampir seluruh konsep pembangunan secara keseluruahan sebagai fenomena ekonomi karena banyak Negara dunia ketiga (termasuk indonesia) dengan konsep yang bertumpu pada GNP hasilnya mencengangkan dunia.

Namun keadaan itu tidak bertahan lama, karena lambat laun beberapa ketimpangan mulai tampak. Keprihatinan berbagai pihak bukan saja bertuju kepada pembangunan ekonomi yang telah mendominasi model-model pembangunan suatu Negara, juga pada masalah pembangunan social yang seakan terabaikan. Tingginya pertumbuhan GNP saat itu seakan-akan telah menjadi satu-satunya tujuan pembangunan. Kecenderungan mengabaikan masalah pendistribusi pendapatan menjadi hal yang "remeh-temeh" semua daya terkonstruksi hanya pada upaya meraih pertumbuhan yang tinggi.

Periode 1970-1980 indonesia menjadi salah satu Negara yang diakui dunia sebagai dengan laju GNP luar biasa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keberhasilan ini memabukkan banyak pihak. Kekesalan masyarakat sudah mulai tampak dalam beberapa gejolak sosial. Pada tahun 1977-1978 ditengah kekesalan masyarakat, beberapa pelaku ekonom masih menampakkan ketidakpatutannya,

Melihat perjalanan sejarah diatas, terlihat sekali bahwa model pembanguanan di indonesia sangat sentralistik dan *top-down*. Demikian pula konsep yang bersifat top-down ternyata banyak menyisakan masalah. Apapun istilahnya konsep yang bersifat top-down pada akhirnya tidak mampu menyentuh seluruh kehidupan masyarakat luas. Konsep top-down bersifat memaksa dan tidak aspiratif terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan era otonomi daerah konsep top-down tidak lagi relevan untuk diterapkan, karena pemikiran dan pemahaman masyarakat telah kian berkembang.

b. Pendekatan Kebutuhan Dasar (*Basic Need Approach*)

Pendekatan kebutuhan dasar telah banyak menarik perhatian diantara peminat study pembangunan dan lembaga-lembaga internasional seperti ILO dan bank dunia. Conyers menyatakan bahwa pendekatan kebutuhan dasar (PKD) adalah sebagai kebijakan pembangunan baik dalam setiap negara khususnya maupun dunia pada umumnya seharusnya dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi seluruh penduduknya. Kebutuhan ini banyak mengundang perdebatan mengenai kenyataan yang apa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang disebut kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu: *pertama* konsumsi bahan pokok seperti sandang, pangan, papan yang dapat dijangkau seluruh orang, *kedua* ada pelayan pokok seperti pendidikan, kesehatan, air bersih yang setiap orang berhak mendapatkan akses yang sama, *ketiga* ada hak berpartisipasi dalam membuat dan melaksanakan program yang berpengaruh terhadap pembangunan pribadi. Diasumsikan bahwa tenaga kerja produktif yang merupakan komponen penting dalam memperoleh pendapatan yang akan digunakan untuk rasa kepuasan peseorangan yang merupakan pelengkap kebutuhan individu.

c. Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Approach*)

Konsep berkelanjutan lahir dari proses evolusi. Evolusi dari isu lingkungan hidup global menjadi isu pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya masalah pencemaran yang makin luas dan meningkat, penduduk dunia barat yang makmur mersa kesejahteraannya terancam.

Karena pemicu ini adalah kerusakan lingkungan hidup terutama pencemaran, tema konfrensi itupun sarat dengan masalah pencemaran. Namun dalam konfernsi itu menyatakan bahwa negara berkembang terdapat masalah lingkungan hidup yang serius misalnya banjir, erosi dan kekurangan air. Sementara di negara maju masalah lingkungan hidup bersumber pada pembangunan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berlebihan (*over development)* misalkan pabrik dan transpor kendaraan bermotor yang jumlahnya sangat banyak. Menurut Almedia, Beckreman, sachs dan corea menyatakan kurangnya pembangunan mengakibatkan kemiskinan yang menjadi kerusakan lingkungan hidup, karena itu negara berkembang maslah lingkunagn harus ditanggulangi dengan meningkatnya pembangunan,

Menurut definisi Komisi Sedunia Lingkungan Hidup dan Pembangunan sebagaimana adikutip oleh Sarwoto, "pembangunan berkelajutan adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang datang untuk memenuhi kebutuhan mereka". Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan mengharuskan dipenuhi syarat:

1) Peningkatan potensi produksi dengan pengolahan yang ramah lingkungan hidup.
2) Menjamin terciptanya kesempatan yang merata dan adil bagi seluruh orang.

Konsep pembangunan berwawasan lingkungan sangat besar pengaruhnya terhadap kelahiran konsepsi pembangunan berkelajutan. Namun demikian, perhatian pembangunan berkelanjutan sudah memperluas visinya tidak hanya pada aspek (biologis-ekologis) melainkan pula pada aspek ekonomi dan sosial. menurut Barbier dalam Soeharto pembanguna berkelajutan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menekankan bahwa pembangunan merupakan proses dan upaya peningkatan kesejahteraan umat manusia yang mesti yang memperhatikan keselarasan proses interaksi anatara tiga sistem yaitu sistem biologis, sistem ekonomi dan sistem sosial. Kelemahannya dari pendekatan pembangunan berkelajutan ini adalah tidak adanya tolak ukur

d. Pendekatan Pembangunan Sosial (*Social Development Approach*)

Pembangunan sosial tidak terkait dengan individu, baik dalam bentuk pemberian bantuan dan pelayanan, penyembuhan ataupun rehabilitasi, melainkan memfokuskan pada komunitas maupun masyarakat serta pada prosesndan struktur sosialsecara luas. Di dalam proses pembangunan, pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi bagaikan dua sisi dari sebuah mata uang logam. Pembangunan sosial tidak akan berperan tanpa pembangunan eonomi begitu sebaliknya pembangunan ekonomi tidak akan berarti kecuali disertai perbaikan kesejarteraan sosial bagi masyarakat secara keseluruhan.

Untuk dapat mengetahui konsep pembangunan sosial dengan mendalam ada tiga kategori makna pembangunan sosial.:

1) Pembangunan sosial sebagai pengadaan pelayanan masyarakat
2) Pembangunan masyarakat sebagi upaya terencana untuk mencapai tujuan sosial kompleks dan bervariasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Pembangunan sosial sebagai upaya terencana untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk berbuat.

e. Pembangunan Berpusat Pada Rakyat (*People Centered Development Approach*)

Tujuan pembangunan sosial menurut ESCAP *(Economic and Social Commision for Asia and Pasific*), Komisi Sosial Ekonomi untuk Asia dan Pasifik) pada dasarnya adalah *development of the well-being of the people* (membangun atau mengembangkan taraf hidup masyarakat). Berdasarkan tujuan tersebut, maka ESCAP melihat pembangunan sosial sesungguhnya menekankan pada pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat. Dengan demikian terlihat kesamaan pola gerak anatara pembangunan sosial dengan pembangunan berpusat pada rakyat (PBR), yaitu pada upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat, dengan memfokuskan pada pemberdayaan dan pembangunan manusia itu sendiri.

Pendapat yang hampir sama yang diungkapkan oleh Edi Suharto, ia mengatakan bahwa PBR pada dasrnya merupakan pendekatan yang memandang inisiatif dan kreativitas dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama yang memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang dicapai oleh prose pembangunan. Menurutnya, pembangunan ini adalah sebagai kritik kekurangan model-model pembangunan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konvensional, baik yang sosialis maupun kapitalis, yang memusatkan perhatian pada produksi, sehingga kebutuhan sistem produksi mendapat tempat yang lebih utama daripada kebutuhan masyarakat.

f. Pendekatan Kesejahteraan Sosial (*Social Walfare Approach*)

Pengertian kesejahteraan sosial

Sebagaimana yang dikemukakan James Midgley dalam *social delevopment : the development perspective in social walfare*, kesejahteraan sosial memiliki penertian yang luas, menurutnya kesejateraan sosial adalah suatu keadaan manusia yang baik atau sejahtera yang wujudnya apabila masalah sosial terkendali (*social problem managed*), apabila kebutuhan-kebutuhan manusia terpenuhi *(human needs are met*), dan apabila kesempatan sosial dimaksimalkan (*social approtunaities are maximized*)

Dalam definisi tersebut, tersirat bahwa individu, keluarga, atau masyarakat yang mampu mengatasi masalah sosialnya akan lebih sejahtera. Begitu juga, individu, keluarga, masyarakatyang kebutuhannya terpenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, keluarga atau masyarakat akan menjadi sejahtera jika memiliki kesempatan sosial untuk mengembangkan dan merealisasikan potensi-potensinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebaliknya, jika ketiga kondisi itu dapat terpenuhi, dapat dipastikan bahwa individu, keluarga atau masyarakat tersebut gagal dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan. Dalam kaitan ini Richard M, Titmuss mengatakan bahwa ketidakmampuan untuk mengatasii masalah-masalah sosial melahirkan kondisui yang disebut penyakit sosial (social illfare). Ketidaksanggupan dalam meraih kesempatan sosial dapat menyebabkan terjadi penyakit sosial. Sementara itu pandangan midgley orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dikatakan sebagai orang ynag tidak dapat mencapai kebahagiaan sosial.

C. PENGORGANISASIAN MASYARAKAT

1. Definisi Pengorganisasian

Pengorganisaian adalah penyatuan, pengelompokan, dan pengaturan orang-orang untuk dapat digerakkan sebagai kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan menuju tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Jadi dalam pengorganisaian tersebut diperlukan untuk menyatukan, mengelompokakna, dann pengaturan, dalam organisai tersebut ada orang-orang untuk digerakkan sebagai kesatuan. Jadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan kekuatan yang besar dibandingkan dengan kekuatan orang-perorang dalam organisasi tersebut ada tujuan yang harus dicapai.[21]

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Dalam teorinya Murray G. Ross mengatakan bahwa teori Pengorganisasian Masyarakat (PM) adalah suatu proses ketika suatu masyarakat berusaha menentukan kebutuhan-kebutuhan atau tujuan-tujuannya, mengatur atau menyusun, mengembangkan kepercayaan dan hasrat untuk memenuhinya, menentukan sumber-sumber dari dalam dan atau dari luar masyarakat, mengambil tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya ini, dan dalam melaksanakan keseluruhannya, memperluas dan mengembangkan sikap-sikap dan praktik-praktik kooperatif dan kolaboratif di dalam masyarakat.[22]

Definisi tersebut mengandung unsur-unsur yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Istilah proses adalah serentetan tindakan mulai dari penentuan masalah atau tujuan sampai pada pemecahan masalah atau tercapainya tujuan di dalam masyarakat. Berbagai proses dapat ditemukan dalam penanggulangan masalah-masalah kemasyarakatan. Dalam kaitan ini, proses dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar berfungsi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi.

---

[21] Dydiet Harjito. *Teori organisasi dan teknik pengorganisasian*, (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 1997). Hal. 93

[22] Abu Huraerah. *Pengorganiasian & PengembanganMasyarakat.* (Bandung. Humaniora. 2008) hal. 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Istilah Masyarakat menunjukkan dua macam penelompokan orang, yaitu :

1) Keseluruhan orang yang tinggal di suatu daerah geografis, misalnya desa, kota, propinsi, dan negara atau dunia. Pada umumnya pengorganisasian masyarakat dilaksanakan di daerah geografis yang sempit, tetapi juga dapat diterapkan untuk daerah-daerah yang lebih luas.

2) Kelompok orang yang memiliki minat-minat atau fungsi yang sama, misalnya dibidang kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, pertanian, keagamaan.

c. Proses menentukan kebutuhan-kebutuhan dan tujuan-tujuan, berarti cara yang dilakukan warga masyarakat untuk menentukan dan memusatkan perhatian pada masalah yang mengganggu mereka serta menentukan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Namun, dalam hal ini tidak seluruh warga masyarakat dapat dilibatkan dalam penentuan kebutuhan-kebutuhan dan tujuan-tujuan. Biasanya, kelompok pemuka masyarakat, tokoh masyarakat atau pemimpin yang mewakili kelompoknya masing-masing.

d. Menyusun atau mengatur kebutuhan-kebutuhan dan tujuan-tujuan berarti perlunya usaha untuk menentukan prioritas.

e. Penemuan sumber-sumber (dari dalam dan atau dari luar masyarakat), mencakup upaya menemukan peralatan-peralatan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang-orang, teknik-teknik, bahan, dan sebagainya yang diperlukan untuk melasanakan tindakan-tindakan yang diperlukan.

f. Mengambil tindakan-tindakan, yaitu melakukan rangkaian kegiatan yang telah disebutkan sebelumnya.[23]

2. Model Pengorganisasian Masyarakat Lokal (PML)

Jack Rothman dalam sebuah tulisannya yang berjudul (*Approaches Comunity Intervention*) mengembangkan tiga model dalam pemahaman konsep PPM: 1) Pengembangan masyarakat lokal (*Locality Development*), 2) Perencanaan Sosial (*Social Planning*), 3) Aksi Sosial (*Social Action*). Paradigma ini merupakan "format ideal" yang dikembangkan jterutama untuk tujuan analisis dan konseptualisasi. Ketiga model ini satu sama lain berkesinambungan,[24]

a. Model Pengembangan Masyarakat Lokal (PML)

Model PML ini memberikan perubahan dalam masyarakat yang dilakukan secara optimal apabila melibatkan partisipasi yang luasdi masyarakat tingkat lokal. PML adalah proses yang dirancang untuk memperoleh atau mendapatkan konisi sosial ekonomi yang lebih maju dan sehat bagi seluruh masyarakat melalui partisipasi aktif mereka serta berdasarkan kepercayaan yang penuh terhadap prakarsa mereka sendiri. Strategi dasar yang digunakan untuk memecahkan masalah adalah usaha penciptaan

[23] Abu Huraerah. *Pengorganiasian & PengembanganMasyarakat.* (Bandung. Humaniora. 2008) hal. 129

[24] Ibid. Hal 134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pengembangan partisipasi yang lebih luas dari seluruh warga masyarakat.

b. Model Perencanaan Sosial (PS)

Model ini menekankan pada proses pemecahan masalah secara teknis terhadap masalah sosial yang subtantif, seperti kemiskinan, pengagguran, kenakalan remaja, kesehatan masyarakat yang buruk dan masalahsosial lainnya,

Selain itu model PS mengungkapkan pentingnya menggunakan cara perencanaan yang matang dan perubahan yang terkendali yakni untuk mencapai tujuan akhir secara sadar dan rasioanal. Dan dalam pelaksanaannya dilakukan pengawasan yang sangat ketat untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi.

Strategi dasar yang digunakan untuk memecahkan permasalahan adalah mengumpulkan fakta dan data mengenai suatu masalah. Kemudian ambil tindakan yang rasional. Implementasi model PS ini bisa berupa program-program yang berhubungan dengan permasalahan sosial, sedangkan teknik yang diguankan mengerahkan tenaga ahli dalam perencanaan pengumpulan data serta analisis data dalam menyusun gagasan yang menciptakan persetujuan.

c. Model Aksi Sosial (AS)

Model AS ini menekankan betapa pentingnya mengenai penanganan secara terorganisasi, terarah, dan sistematis terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelompok yang tidak beruntung, juga meningkatkan kebutuhan yang memadai bagi masyarakat yang lebih luas dalam rangka meningkatkan sumber atau perlakuan yang lebih sesuai dengan keadilan sosial dan nilai-nilai demokratis.

Tujuan yang ingin dicapai adalah mengubah sistem atau kebijakan pemerintah secara langsung dalam rangka menangulangi masalah yang mereka hadapi sendiri. Dalam kaitan ini Suharto menjelaskan tujuan dan sasaran utama AS adalah perubahan fundamental dalam kelembagaan pada struktur masyarakat melalui proses pendistribusian kekuasaan dan pengambilan keputusan. AS berorientasi pada "tujuan prose" dan "tujuan hasil". Masyarakat diorganisasi melalui proses penyadaran, pemberdayaan, dan tindakan-tindakan yang aktual yang mengubah struktur kekuasaan agar lebih memenuhi prinsip demokrasi, kemerataan, dan keadilan.

3. Penguatan Kelembagaan

Peran kelembagaan sangat penting dalam mengatur berjalannya proses pembangunan Desa Mandiri Gotong Royong, karena pemerintah desa tidak dapat berjalan sendiri dalam menjalankan kegiatan tersebut tanpa adanya fasilitasi dari lembaga yang memiliki pengetahuan tentang proses didalamnya. Pembentukan unit satlak atau lembaga *ad-hoc* yang khusus mengurusi kegiatan tersebut dapat mengefektifkan proses berjalannya program dari awal sampai pada tahap selanjutnya. Model kelembagaan yang diperlukan adalah lembaga yang memiliki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengalaman dalam mengelola 4 sektor penting diatas, artinya secara kafabilitas mereka pernah menghadapi kasus sejenis dengan berbagai masalahnya.

Secara kelembagaan model kelembagaan PPK-IPM sebagian besar memilki relevansi terhadap kegiatan sejenis, karena selain mengurusi hal teknis lembaga ini memiliki mitra ahli dalam bidang yang dikembangkan. Tingkat keberhasilan program akan sangat bergantung pada kemampuan organisasi dalam *memanage* setiap sektor kegiatan. Yang perlu ditambahkan adalah pelibatan fasilitator seintensif mungkin dalam membimbing para pelaku usaha di desa dan menjadi jembatan antara satlak dengan proses keberlangsungan usaha.

Masyarakat Indonesia betapapun mereka hidup sederhana, telah mengembangkan mekanisme dalam upaya memenuhi kebutuhan, menjangkau sumber dan pelayanan serta berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan. Mekanisme tersebut dilembagakan dalam sebuah wahana yang berupa organisasi, baik yang dilandasi oleh keagamaan, kesukuan maupun etnis.

Di berbagai wilayah di Indonesia, selama ini ditelah istilah *"Mapalus"* di Sulawesi Utara, *"Banjar"* di Bali, *"Todung Natolu"* di Sumatera Utara, dan *"Rereyongan Sarupi"* di Jawa Barat. Nilai sosial budaya lokal atau kearifan lokal tersebut telah terlembaga dengan baik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam masyarakat lokal, dan menjiwai semua aktivitas masyarakat lokal tersebut. masyarakat lokal.[25]

Dengan demikian menjadi jelas, bahwa keberadaan organisasi yang telah tumbuh dan berkembang pada masyarakat lokal, telah menjadi alternatif mekanisme pemecahan masalah. Organisasi yang ada di masyarakat memperlihatkan ciri-ciri, seperti egalitarianisme, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi, keterbukaan partisipasi bagi seluruh anggota, penegakan hukum dan keadilan, toleransi dan pluralisme serta mengembangkan musyawarah.

Ciri-ciri organisasi lokal ini telah mengakomodasi unsur hak asasi manusia dan demokratisiasi pada tingkat lokal. Karena itu, apabila berbagai ciri yang melekat pada organisasi lokal ini dapat dipertahankan, akan semakin memperkuat ketahanan sosial masyarakat dalam nuansa pluralisme.[26]

Sehubungan dengan itu, organisasi dan kearifan lokal, yang tumbuh dan berkembang di masyarakat lokal, perlu diberikan ruang gerak yang luas agar dapat mengekspresikan dan mengartikulasikan berbagai kebutuhan masyarakat lokal khususnya untuk meningkatkan pembangunan di desanya.

---

[25] Jo Hann Tab & Roem Topatimasang, *Mengorganisir Rakyat Refleksi Pengalaman Pengorganisasian Rakyat di Asia Tenggara*, (Yogyakarta: SEAPCP & INSIST Press, 2004). Hal. 91-92

[26] Dydiet Harjito. *Teori oraganisasi dan teknik pengorganisasian*, (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 1997). Hal. 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lebih jauh dari itu, berkembangnya keswadayaan masyarakat dan peran aktifnya dalam pembangunan, khususnya pembangunan kesejahteraan sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh Korten , bahwa pembangunan akan mampu mengembangkan keswadayaan masyarakat apabila pembangunan itu berorientasi pada kebutuhan masyarakat *(people centered development)*.

Pembangunan yang berpusat pada masyarakat itu dapat direalisasikan apabila memanfaatkan organisasi lokal yang ada di masyarakat. Dalam kaitannya dengan pembangunan pedesaan, bahwa bentuk kelompok informal yang tumbuh dari bawah dan berciri demokratik, merupakan wadah bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Pembinaan kelompok informal ini menyebabkan komunikasi antara pemerintah dan masyarkat desa bisa efektif. Pemikiran ini sesuai dengan Agenda 21 yang menekankan tanggung jawab khusus dari otoritas lokal dengan konsep *"berpikir global, bertindak lokal"*, dan deklarasi IULA (*International Union of Lokal Authorities*) dan EU (*European Union*) tahun 1985, dimana adanya keharusan bagi otoritas lokal di seluruh dunia memberikan prioritas untuk partisipasi bagi organisasi lokal, perusahaan swasta, perempuan dan pemuda, dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan implementasi proyek-proyek

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lokal dan perencanaan "Agenda 21" atau semua hal yang bersifat lokal.[27]

Dalam perspektif pekerjaan sosial, nilai sosial budaya dan organisasi lokal tersebut merupakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) atau modal sosial (*social capital*) dalam rangka pembangunan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan organisasi dan kearifan lokal tersebut memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan masyarakat.

Dengan demikian, peranan yang sinergi antara peningkatan desa produktif dengan organisasi masyarakat lokal diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan dengan sasaran-sasaran strategis untuk berkurangnya desa tertinggal dan terisolir, berkurangnya indeks kemiskinan, meningkatnya pendapatan masyarakat yang ditandai dengan terciptanya lapangan kerja dan kesempatan kerja, berkembangnya perekonomian lokal masyarakat, kuatnya jaringan informasi dan ekonomi serta peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat. Dan tidak yang tidak kalah penting adalah percepatan rehabilitasi desa pasca konflik dan bencana alam dapat tercapai dalam waktu dekat.

---

[27] Abu Hurairoh. *Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat.* (Bandung. Humaniora. 2008) hal. 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemikiran ini sesuai dengan Agenda 21 yang menekankan tanggung jawab khusus dari otoritas lokal dengan konsep berpikir global, bertindak lokal, dan deklarasi IULA (International Union of Lokal Authorities) dan EU (European Union) tahun 1985, di mana adanya keharusan bagi otoritas lokal di seluruh dunia memberikan prioritas untuk partisipasi bagi organisasi lokal, perusahaan swasta, perempuan dan pemuda, dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan implementasi proyek-proyek lokal dan perencanaan Agenda 21 atau semua hal yang bersifat lokal (Izzedin Bakhit, 2001). Dalam perspektif pekerjaan sosial, nilai sosial budaya dan organisasi lokal tersebut merupakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) atau modal sosial (*social capital*) dalam rangka pembangunan masyarakat.

Dengan demikian, keberadaan organisasi dan kearifan lokal tersebut memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan masyarakat. Peranan yang sinergi antara KPDT dan organisasi masyarakat lokal diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan dengan sasaran-sasaran strategis untuk berkurangnya desa tertinggal dan terisolasi, berkurangnya indeks kemiskinan, meningkatnya pendapatan masyarakat yang ditandai dengan terciptanya lapangan kerja dan kesempatan kerja, berkembangnya perekonomian lokal masyarakat, kuatnya jaringan informasi dan ekonomi serta peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat. Tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak kalah penting adalah percepatan rehabilitasi desa pascakonflik dan bencana alam dapat tercapai dalam waktu dekat.

D. Pemberdayaan Desa Produktif

Dari adanya program Desa produktif harapan dari konsep satu produk unggulan desa *(one village one product/ OVOP)* yang dapat menjadi kebanggan lokal dapat terwujud. Masyarakat desa sebagai pemilik usaha akan mendapat keuntungan, artinya desa diharapakan tidak lagi bergantung penuh terhadap pembiayaan kecil dari APBD (kemandirian). Kegiatan ini harus menjadi kegiatan usaha/mencari nafkah bagi para ibu yang terlibat didalamnya. Hal penting lain adalah kaum ibu akan memiliki kebanggan karena mereka memiliki aktifitas yang berkontribusi terhadap kemajuan desa nya.

Hal penting dalam pemberdayaan BUMD sebagai unit pemasaran pemerintah dalam Program Desa Mandiri Gotong Royong adalah menyerap semua produk lokal, sehingga tidak ada kekhawatiran setiap desa bahwa produk yang dihasilkan tidak aka nada yang membeli dengan cara ini ada semangat yang tumbuh dimasyarakat dimana hasil jerih payah mereka akan ada yang membeli. .

Namun demikian kita masih tetap mendengar dan juga melihat adanya berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat yang tidak mungkin dapat dipecahkan oleh mereka sendiri tanpa adanya sentuhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bantuan maupun bimbingan dari stake holder terkait. Oleh karena itulah sistem inovasi daerah perlu kita bangun agar semua pemangku kepentingan bisa bersinerji memberi dukungan kepada masyarakat, sehingga mereka bisa menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan sesuai dengan potensi masing-masing daerah yang bersangkutan. Dengan cara itulah kesejahteraan rakyat benar-benar dapat diraih dan ketergantungan kepada produksi luar negeri secara bertahap dapat kita hindarkan.

Suatu gerakan sosial pada umumnya dimaksudkan untuk mendorong dan mempercepat terjadinya transformasi nilai, bahkan transformasi struktural dalam masyarakat. Oleh sebab itu, sebetulnya gerakan sosial diharapkan mempercapat proses reorientasi berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam persepektif baru.

Proses pemberdayaan masyarakat desa, diharapkan menghasilkan perubahan dalam pola relasi sosial terutama pola dominasi, baik dominasi penguasaan sumber daya, dominasi dalam proses pengambilan keputusan, dominasi dalam akses terhadap informasi dan dominasi terhadap akses untuk memperoleh pelayanan.

Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan yaitu metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yang mengandung konsep yang dikembangkan untuk menjawab berbagai kritik terhadap pola pengembangan program pembangunan pedesaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan *Participatory Rural Appraisal* sebagai satu diantara metode pendekatan pembangunan pedesaan adalah melibatkan masyarakat pedesaan dalam keseluruhan kegiatan pembangunan sehingga bisa menumbuhkan keberdayaan. Metode *Participatory Rural Appraisal* bertujuan menjadikan warga masyarakat sebagai peneliti, perencana, dan pelaksana program pembangunan dan bukan sekedar obyek pembangunan.

Participatory Rural Appraisal menggunakan teknik-teknik kependidikan, komunikasi, riset serta merancang proses (kegiatan) dan visualisasi yang mudah ditangkap, sehingga dapat dilaksanakan ditingkat desa dengan sarana yang ada. Penerapan pendekatan dan teknik-teknik PRA dalam pengembangan program dinilai akan bisa memberikan PRA peluang lebih besar dan terarah bagi keterlibatan warga masyarakat pedesaan.

Kritik *Participatory Rural Appraisal* terhdap pembangunan adalah, bahwa program-program pembangunan selalu diturunkan "dari atas" (top down) dan masyarakat tinggal melaksanakan.

Proses perencanaan program tidak melalui suatu "penilaian kebutuhan" (needs assessment) masyarakat, tetapi seringkali dilaksanakan hanya berdasarkan asumsi, survie, studi, atau penelitian formal yang dilakukan oleh petugas atau lemabaga ahli-ahli penelitian. Akibatnya, program tersebut kerap kali tidak relevan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kebutuhan masyarakat dan tidak adanya rasa memiliki terhadap program itu.[28]

E. KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Ferdahulu Yang Relevan

1. Perubahan pola mata pencaharian dan pengembangan masyarakat di Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini dilakukan oleh Nikmatus Zahrah pada Tahun 2000 di desa Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, dengan rumusan masalah:
   a. Bagaimana pola mata pencaharian dan pengembangan masyarakat
   b. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat
   c. Bagaimana relevansinya
2. Pengembangan suwadaya masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa melalui program SMPP dan BAPENAS. Penelitian ini dilakukan oleh Mustainah pada tahun 2008 dengtan rumusan masalah:
   a. Bagaimana program sistem menejemen pembangunan partisipatif
   b. Apakah faktor penghambat dan faktor pendukung

[28] Isbanda Rukminto Adi. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas.* (Jakarta : Fakultas Ekonomi UI. 2003.hal.120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bagaimana relevansinya dengan dakwah pengembangan masyarakat.

3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui budi daya belimbing di desa Tasik Madu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

   Penelitian ini dilakukan oleh Mohammad Ekhwan pada 2010 dengan rumusan masalah:

   a. Bagaimana proses pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Budi Daya Belimbing

   b. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat

   c. Bagaimana relevansinya.

Dari ketiga fokus masalah yang diangkat sehingga dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat setempat dalam upaya pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa masih rendah, hal ini disebabkan banyaknya birokrasi pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat yang ikut campur dan tidak mengedepankan partisipasi mayarakat umum.

Sedangkan dalam penerapan strategi pemberdayaan masyarakat juga bersifat top down, yang ini berimbas kepada hasil dari sebuah pemberdayaan mayarakat yang tidak tepat sasaran, karena tidak mengikutsertakan masyarakat yang secara umum adalah pelaksanaan dari sebuah pembangunan yang akan dilaksanakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id